

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU/ PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B)



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 Audited BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Untuk Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025



bappebti.go.id



Kementerian Perdagangan
Gedung Utama Lantai 4
Jl. M.I Ridwan Rais, No.5 Jakarta 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon-I Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendorong perbaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Jakarta, 6 Mei 2026
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,


TIRTA KARMA SENJAYA
NIP. 19750718 200502 1001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendorong perbaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Jakarta, 6 Mei 2026
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,


TIRTA KARMA SENJAYA
NIP. 19750718 200502 1001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Tingkat Eselon - I Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (**SPI**) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (**SAP**).

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,

TIRTA KARMA SENJAYA
NIP. 19750718 200502 1001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (**LRA**), **Neraca**, Laporan Operasional (**LO**), Laporan Perubahan Ekuitas (**LPE**), dan Catatan atas Laporan Keuangan (**CaLK**), sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (**SPI**) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (**SAP**).

Jakarta, 6 Mei 2026

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,



TIRTA KARMA SENJAYA
NIP. 19750718 200502 1001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp624.890.450 atau mencapai 208,30 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp300.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp18.353.908.269 atau mencapai 57,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.052.551.000. Hal ini dikarenakan beberapa anggaran yang dikenakan blokir pagu.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.740.526.889 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.762.490, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.201.905.742, Piutang Jangka Panjang Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp10.517.858.657.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.740.526.889.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, Beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp520.602.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.516.638.726 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(17.996.036.726). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit/surplus sebesar Rp 71.038.450 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(18.594.518.836)).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp12.459.695.115 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(18.594.518.836), Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp (4.468.000) dan koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp175.453.576 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.704.365.034 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp11.740.526.889.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		300,000,000	624,890,450	208.30	893,344,038
JUMLAH PENDAPATAN		300,000,000	624,890,450	208.30	893,344,038
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	1,333,520,700
Belanja Barang	B.4	29,083,247,000	17,831,287,228	61.31	23,758,630,210
Belanja Modal		2,969,304,000	522,621,041	17.60	1,057,034,250
Jumlah Belanja Operasi		32,052,551,000	18,353,908,269	57.26	26,149,185,160
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	1,794,304,000	472,726,541	26.35	688,875,000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	805,000,000	-	0.00	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya		370,000,000	49,894,500	13.49	368,159,250
Jumlah Belanja Modal		2,969,304,000	522,621,041	17.60	1,057,034,250
JUMLAH BELANJA		32,052,551,000	18,353,908,269	57.26	26,149,185,160

II. NERACA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.3	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	-	-
Persediaan	C.6	20.762.490	64.989.590
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan		-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.7	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Jumlah Aset Lancar		20.762.490	64.989.590
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.8	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.9	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.10	-	-
Peralatan dan Mesin	C.11	10.956.375.866	19.255.420.863
Gedung dan Bangunan	C.12	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	-	475.090.000
Aset Tetap Lainnya	C.14	2.000.000	153.180.461
Konstruksi dalam pengerjaan	C.15	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(9.756.470.124)	(18.486.879.783)
Jumlah Aset Tetap		1.201.905.742	1.396.811.541
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.17	12.226.526.420	12.176.631.920
Aset Lain-Lain	C.18	9.981.792.581	9.676.006.105
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(11.690.460.344)	(10.851.578.981)
Jumlah Aset Lainnya		10.517.858.657	11.001.059.044
JUMLAH ASET		11.740.526.889	12.462.860.175
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.20	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21	-	3.165.060
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.22	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	3.165.060
JUMLAH KEWAJIBAN		-	3.165.060
EKUITAS			
Ekuitas	C.23	11.740.526.889	12.459.695.115
JUMLAH EKUITAS		11.740.526.889	12.459.695.115
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.740.526.889	12.462.860.175

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	520,602,000	744,050,000
JUMLAH PENDAPATAN		520,602,000	744,050,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1,334,616,327
Beban Persediaan	D.3	711,898,195	505,906,820
Beban Barang dan Jasa	D.4	8,291,830,562	11,364,449,716
Beban Pemeliharaan	D.5	1,978,409,364	1,637,193,555
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,885,743,147	10,276,581,257
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	33,750,000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	648,757,458	807,978,005
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	149,574
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		18,516,638,726	25,960,625,254
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(17,996,036,726)	(25,216,575,254)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(669,520,560)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		71,038,450	149,294,038
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(598,482,110)	149,294,038
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,594,518,836)	(25,067,281,216)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18,594,518,836)	(25,067,281,216)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	12.459.695.115	12.313.633.961
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.594.518.836)	(25.067.281.216)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	170.985.576	(243.540)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	(4.468.000)	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	175.453.576	(243.540)
LAIN-LAIN	E.4.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	17.704.365.034	25.213.585.910
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(719.168.226)	146.061.154
EKUITAS AKHIR	E.6	11.740.526.889	12.459.695.115

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu entitas di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas menjalankan beberapa sistem perdagangan yang mampu mempertinggi daya saing melalui 3 (tiga) bidang kegiatan, yakni Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tujuan antara lain meningkatkan daya saing komoditi di pasar dalam dan luar negeri, menciptakan pembentukan dan referensi harga yang transparan, meningkatkan pemanfaatan SRG sebagai alternatif pembiayaan, dan meningkatkan pendapatan petani/kelompok tani dan UKM melalui efisiensi pemasaran komoditi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan **Asta Cita** sebagai **8 (delapan) Misi** Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan dan menyelaraskan Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 yang tertuang dalam PERMENDAG Nomor 34 Tahun 2025. Untuk itu, Visi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selaras dengan Visi Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 yakni sebagai berikut:

“Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Mengacu pada Misi Presiden Periode 2025-2029, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;
2. Meningkatkan Kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029;

3. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Urusan Perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perdagangan, terdapat 3 (tiga) tujuan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar Dalam Negeri**; melalui kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mendukung stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan gangguan rantai pasok global.
2. **Meningkatnya Nilai dan Kualitas Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**; melalui peningkatan volume ekspor, diversifikasi pasar dan produk, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (global value chain/GVC).
3. **Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif**; melalui penyederhanaan dan efisiensi proses layanan publik dengan digitalisasi, penguatan tata kelola berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence based) lebih tepat sasaran, serta penguatan akuntabilitas yang dilihat dari kewajaran laporan keuangan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan strategis Kementerian Perdagangan periode 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam PERMENDAG Nomor 34 Tahun 2025, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui:

“Optimasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) sehingga meningkatkan transaksi di bidang komoditi”.

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang berfokus pada “Pengamanan Pasar Dalam Negeri” selaras dengan arah kebijakan Bappebti dalam membangun ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang maju dan berkelanjutan, maka arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bappebti yakni:

1. **Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik;** melalui Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Informasi, Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Pasar secara Transparan, Peningkatan Literasi Publik dan Diseminasi Informasi secara Masif dan Inklusif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil terhadap Pelanggaran Pelaku Usaha, Reformasi Tata Kelola Pelaku Usaha dan Lembaga Penunjang secara Profesional, dan Peningkatan Partisipasi Publik dan Akuntabilitas dalam Proses Kebijakan
2. **Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan;** melalui Penguatan Infrastruktur Pasar dan Kelembagaan yang Responsif terhadap Perubahan, Pengembangan Produk dan Skema Transaksi yang Relevan, dan Inklusif, Peningkatan Kolaborasi Multi Stakeholder untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas, Penerapan Prinsip Berkelanjutan (Sustainability) dalam operasional PBK, SRG, dan PLK, Evaluasi dan Revisi Kebijakan Secara Adaptif berdasarkan Monitoring dan Analisis Risiko, Penguatan Regulasi Berbasis Risiko dan Prinsip Keadilan, Peningkatan Sistem Pengawasan dan Audit Pelaku Usaha secara Terintegrasi, Penegakan Hukum yang Tegas, Proporsional, dan Transparan, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha dalam Mematuhi Regulasi, Peningkatan Literasi Regulasi dan Hak nasabah bagi Masyarakat.
3. **Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih;** melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Digitalisasi dan Inovasi Layanan, Penguatan Sistem Pengendalian Internal.
4. **Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK;** melalui Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha PB, Pengembangan Produk dan Instrumen PBK yang Inovatif dan Responsif terhadap Kebutuhan Pasar, Pemantapan Infrastruktur Fisik dan Digital untuk Mendukung Perdagangan Berjangka, Peningkatan Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Pasar PBK, Penguatan Kolaborasi dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan PBK.
5. **Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK;** melalui Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Lembaga Pelaksana SRG dan Pengelola PLK.
6. **Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK;** melalui Pengembangan Komoditas dan Model Usaha SRG dan PLK yang

Relevan, Digitalisasi Sistem SRG dan PLK untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas, Peningkatan Literasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dan Petani sebagai Pengguna SRG dan PLK, Penguatan Kemitraan Strategis untuk Mendorong Konektivitas Pasar dan Pembiayaan.

7. **Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG, dan PLK;** melalui Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Digital, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas, Penerapan Mekanisme Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif, Penguatan Penindakan dan Tindak Lanjut Pengawasan secara Cepat dan konsisten.
8. **Meningkatnya efektivitas kebijakan dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK;** melalui Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Regulasi, Penyusunan Regulasi yang Responsif terhadap Dinamika Pasar dan Transformasi Digital, Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum secara Proaktif dan Terintegrasi, Penguatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait, peningkatan Peran Partisipatif Publik dan Pelaku Usaha dalam Proses Regulasi.
9. **Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Bappebti;** melalui Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi; Pengembangan Sistem Manajemen SDM yang Kompeten dan Berintegritas, Digitalisasi Proses Bisnis dan Layanan Publik Bappebti, peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi keuangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Inklusif, dan Berorientasi Pengguna.

Outcome yang diharapkan dari Optimasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yakni: **(1) Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan; (2) Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih.**

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh satu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ujian profesi calon wakil pialang berjangka diakui berdasarkan lolos/tidaknya seleksi administratif dan telah membayar biaya ujian;
 - b. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ijin pembukaan kantor cabang pialang berjangka yang diakui setelah persyaratan disetujui dan telah membayar biaya jasa perijinan;

- c. Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ijin wakil pialang berjangka dan sertifikat pendaftaran pedagang berjangka diakui setelah terbit sertifikat, SK, dan telah membayar biaya perijinan ;
- d. Pendapatan Jasa lainnya berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan pelaku usaha PBK diakui pada saat dikeluarkannya surat pengenaan/penetapan sanksi administratif berupa denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **(6) Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **(7) Aset Tetap**

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

(8) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

(9) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(10) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(11) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(12) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(13) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

<i>Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali</i>	(14) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca yang berbasis <i>cash toward accrual</i> direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
---	--

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN*Realisasi**Pendapatan**Rp.624.890.450***B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp624.890.450,- atau mencapai 208.30% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,-. Pendapatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Pendapatan
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	-	33.250.000	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	240.000.000	401.000.000	167,08
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	-	-
Pendapatan Denda	60.000.000	119.602.000	199,34
Pendapatan Lain-lain	-	71.038.450	-
Jumlah	300.000.000	624.890.450	208,30

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 Rp624.890.450,- mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 Rp893.344.038 senilai Rp268.453.588,- atau sebesar 30.05%. Hal ini dikarenakan menurunnya Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang disebabkan oleh: i) Perubahan tarif PNBP untuk sertifikasi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan ii) Penurunan peserta yang mengikuti Ujian CWPB. Pendapatan Lain-lain terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	33.250.000	-	100,00
Pendapatan Lain-lain	71.038.450	149.294.038	(110,16)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	401.000.000	625.000.000	(55,86)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	-	
Pendapatan Denda	119.602.000	119.050.000	0,46
Jumlah	624.890.450	893.344.038	(0,30)

Realisasi Belanja
Negara
Rp18.353.908.269

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada tahun 2025 sebesar Rp18.353.908.269,- atau 57,26% dari anggaran belanja sebesar Rp32.052.551.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp13.529.125.000,- atau 41,58%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Pagu Blokir	Realisasi
Belanja Pegawai	-	-	0
Belanja Barang	29.083.247.000	11.086.421.000	17.831.287.228
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	2.969.304.000	2.442.704.000	522.621.041
Total Belanja Kotor	32.052.551.000	13.529.125.000	18.353.908.269
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	32.052.551.000	13.529.125.000	18.353.908.269

Realisasi Belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 29,81% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2024, hal ini dikarenakan anggaran belanja pegawai disentralisasikan di Biro Keuangan Kementerian Perdagangan dan terdapat pagu blokir pada akun belanja barang dan belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1.333.520.700	-
Belanja Barang	17.831.287.228	23.758.630.210	(24,95)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	522.621.041	1.057.034.250	(50,56)
Jumlah	18.353.908.269	26.149.185.160	(29,81)

Belanja Pegawai
Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.333.520.700,-. Realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dari tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat perpindahan anggaran belanja pegawai ke Biro Keuangan Kementerian Perdagangan.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	638.196.299	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	380.281.373	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	315.043.028	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1.333.520.700	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.333.520.700	(100,00)

Belanja Barang
Rp17.831.287.228

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.831.287.228,- dan Rp23.758.630.210,-. Realisasi Belanja Barang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 24.95% dari Realisasi Belanja Barang tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pagu Anggaran 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran 2024, selain itu terdapatnya Pagu Blokir sebesar Rp13.529.125.000,- atau 41.58% dari Pagu Anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.378.093.624	3.322.643.130	(28,43)
Belanja Barang Non Operasional	2.769.146.725	3.025.457.357	(8,47)
Belanja Barang Persediaan	672.139.095	482.511.300	39,30
Belanja Jasa	3.147.755.273	5.014.754.611	(37,23)
Belanja Pemeliharaan	1.978.409.364	1.637.193.555	20,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.886.853.427	9.671.431.864	(28,79)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	612.056.623	-
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	17.832.397.508	23.766.048.440	(24,97)
Pengembalian Belanja Barang	(1.110.280)	(7.418.230)	-
Jumlah Belanja	17.831.287.228	23.758.630.210	(24,95)

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Tanah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
31 Desember Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp472.726.541

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp472.726.541,- mengalami penurunan 31.38% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 yakni sebesar Rp688.875.000,-.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor	-	-	-
Alat Rumah Tangga	-	-	-
Peralatan Studio dan Film	13.200.000	-	-
Alat Bengkel Bermesin	-	232.000.000	-
Alat Komunikasi	-	-	-
Komputer Unit	403.126.541	404.695.000	(0,39)
Peralatan Komputer	-	52.180.000	(100,00)
Komputer Jaringan	-	-	-
Alat Dalmas/Alat Dakhura	42.500.000	-	-
Peralatan Fasilitas Listrik	13.900.000	-	-
Meja Rapat	-	-	-
Sofa	-	-	-
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	472.726.541	688.875.000	(31,38)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	472.726.541	688.875.000	(31,38)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebagaimana berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebagaimana berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Lainnya
Rp49.894.500

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp49.894.500,- dan Rp368.159.250,-. Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 86.45% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Aset tetap lainnya	49.894.500	368.159.250	(86,45)
Jumlah Belanja Kotor	49.894.500	368.159.250	(86,45)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	49.894.500	368.159.250	(86,45)

Adapun Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya yakni berupa Pengembangan Aplikasi Penanganan Perselisihan Nasabah senilai Rp49.894.500,-.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Kas Bendahara Pengeluaran		-
Uang Tunai	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Uang muka belanja
pegawai (prepayment)
Rp0

C.3 Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)

Uang muka belanja pegawai (prepayment) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian uang muka belanja pegawai (prepayment) pada tanggal pelaporan dimasukkan dalam akun sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2025	TA 2024
Uang Muka Belanja Pegawai	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih
harus Diterima Rp0

C.4 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang masih diterima merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Masih Harus Diterima

Uraian	TA 2025	TA 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
(Netto) Rp0

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak sudah tidak ada, dan di perlukan jurnal balik. Piutang Bukan Pajak rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Debitur	TA 2024	TA 2023
1	Piutang Bukan Pajak	-	-
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - P	-	-
Jumlah		-	-

Persediaan
Rp20.762.490

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.762.490 dan Rp64.989.590. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	20.762.490	60.521.590
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	4.468.000
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	20.762.490	64.989.590

Saldo Persediaan sebesar Rp20.762.490 tersebut berdasarkan hasil stock opname tanggal 31 Desember 2025 nomor PL.06/965.1/Bappebti.1/BA-SO/12/2025 Nilai Hasil Cek Fisik di Gudang ATK Bappebti Kemendag Rp. Rp25.230.490 . Rincian Barang Konsumsi adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301014	Barang Cetak	12,416,250
1010302002	Berbagai Kertas	40,740
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	8,305,500
	Jumlah Barang Konsumsi	20,762,490

Terkait Data Input senilai Rp4.468.000 berdasarkan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal maka telah dilakukan Reklasifikasi dari Persediaan ke Peralatan dan Mesin.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Netto) Rp0

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

No	Debitur	TA 2025	TA 2024
1	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.8 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2025	TA 2024
1	Piutang Karyawan atas TGR	-	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

TPA
Rp.0.-

C.9 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2025	TA 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

C.10 Tanah

Tanah
Rp.0.-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

C.11 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp10.956.375.866

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp10.956.375.866 dan Rp19.255.420.863. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	19.255.420.863
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.553.740.271
Mutasi kurang:	
Mutasi Kurang	(10.852.785.268)
Saldo per 31 Desember 2025	10.956.375.866
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(9.756.470.124)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.199.905.742

Mutasi Pembelian berupa:

- 16 Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp. 232.000.000
- 127 Unit Alat Kantor Rp. 493.286.122
- 291 Unit Alat Rumah Tangga Rp. 1.093.632.208
- 2 Unit Alat Studio Rp. 62.145.000

- e. 1 Unit Alat Khusus Kepolisian Rp. 42.500.000
- f. 31 Unit Komputer Unit Rp. 540.333.541
- g. 4 Unit Peralatan Komputer Rp. 19.102.000
- h. 4 Unit Alat Kerja Penerbangan Rp. 70.741.400

Mutasi transaksi penghentian aset dari penggunaan peralatan dan mesin berupa:

- a. 2 Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp. 270.000.000
- b. 16 Unit Alat Bengkel Bermesin Rp. 232.000.000
- c. 410 Unit Alat Kantor Rp. 2.161.154.586
- d. 642 Unit Alat Rumah Tangga Rp. 2.279.024.734
- e. 115 Unit Alat Studio Rp. 714.968.638
- f. 47 Unit Alat Komunikasi Rp. 69.294.750
- g. 22 Unit Alat Kedokteran Rp. 55,300,000
- h. 1 Unit Alat Khusus Kepolisian Rp. 3,000,000
- i. 161 Unit Komputer Unit Rp. 2.313.763.520
- j. 151 Unit Peralatan Komputer Rp. 2.754.279.040

Gedung dan
Bangunan Rp.0.-

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Jalan. Jaringan dan
Irigasi Rp0.

C.13 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp475.090.000. Aset tersebut diperoleh

Tahun 2012 yang merupakan Instalasi Jaringan untuk penguatan jaringan dan mendukung Program Tugas dan Fungsi Bappebti dengan alamat Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta 10430. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	475.090.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(475.090.000)
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Tetap Lainnya
Rp2.000.000

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.000.000 dan Rp153.180.461.

Mutasi berkurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp Rp151.180.461 dengan rincian:

1. 783 Unit Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp148.180.461
2. 6 Unit Barang Bercorak Kesenian senilai Rp 3.000.000;

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0.-

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(9.756.470.124)

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(9.756.470.124) dan Rp(18.486.879.783). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.956.375.866	9.756.470.124	1.199.905.742
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	153.180.461	-	153.180.461
Jumlah		11.109.556.327	9.756.470.124	1.353.086.203

Aset Tak Berwujud
Rp12.226.526.420

C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.226.526.420 dan Rp12.176.631.920. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 merupakan saldo awal sebesar Rp. 12.769.183.480. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12.769.183.480
<i>Mutasi tambah:</i>	
Pengembangan Aplikasi Penanganan Perselisihan Nasabah	49.894.500
<i>Mutasi kurang:</i>	
Lisensi Firewall Fortige	90.016.560
Pengembangan Aplikasi Penunjang Statistik PBK	149.050.000
SRG Mobile Android	197.615.000
Digitalisasi Peraturan Bappebti	155.870.000
Saldo per 31 Desember 2025	12.226.526.420
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(2.016.778.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.209.747.920

1. Lisensi Firewall Fortige dihapuskan sesuai SK No 25 Tahun 2025
2. Pengembangan Aplikasi Penunjang Statistik PBK, SRG Mobile Android & Digitalisasi Peraturan Bappebti dihapuskan sesuai SK No 129 Tahun 2025

Aset Lain-Lain
Rp 9.981.792.581

C.18 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 9.981.792.581 dan Rp9.676.006.105. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN)

yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	9.083.454.545
<i>Mutasi tambah:</i>	7.966.899.921
<i>Mutasi Kurang:</i>	7.068.561.885
Saldo per 31 Desember 2025	9.981.792.581
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(9.673.681.844)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	308.110.737

Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin diantaranya:

- 2 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 270,000,000
- 240 Unit Alat Kantor Rp 1,422,799,645
- 514 unit Alat Rumah Tangga Rp 769,754,500
- 18 Unit Alat Studio Rp. 97,024,000
- 76 Unit Alat Komunikasi Rp. 114,989,000
- 189 Unit Komputer Rp. 2,385,888,940
- 268 Unit Peralatan Komputer Rp. 1,819,042,300
- 85 Unit Bahan Perpustakaan Tercetak Rp. 99,823,500
- 7 Unit Barang Bercorak Kesenian Rp. 89,240,000

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp (11.690.460.344)*

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (11.690.460.344) dan Rp (10.851.578.981). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	12.226.526.420	2.016.778.500	10.209.747.920
Aset Lain-lain	9.981.792.581	9.673.681.844	308.110.737
Jumlah	22.208.319.001	11.690.460.344	10.517.858.657

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.20 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp0

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.165.060. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang Yang Belum
Diterima Tagihannya
Rp 0

C.22 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Ekuitas
Rp.11.744.994.889.

C.23 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.11.740.526.889 dan Rp.12.459.695.115. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB Rp520,602,000	D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL																																																																				
	D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak																																																																				
	Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp520.602.000,- dan Rp744.050.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:																																																																				
	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024																																																																				
	<table><tr><th>URAIAN</th><th>TA 2025</th><th>TA 2024</th><th>NAIK (TURUN) %</th></tr><tr><td>Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan</td><td>401,000,000</td><td>625,000,000</td><td>(35.84)</td></tr><tr><td>Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan</td><td>119,600,000</td><td>119,050,000</td><td>0.46</td></tr><tr><td>Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pendapatan Anggaran Lain-lain</td><td>2,000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pendapatan Lain-lain</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>520,602,000</td><td>744,050,000</td><td>(30.03)</td></tr></table>	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	401,000,000	625,000,000	(35.84)	Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan	119,600,000	119,050,000	0.46	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,000	-	-	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	Jumlah	520,602,000	744,050,000	(30.03)																																								
URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %																																																																		
Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	401,000,000	625,000,000	(35.84)																																																																		
Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan	119,600,000	119,050,000	0.46																																																																		
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-																																																																		
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,000	-	-																																																																		
Pendapatan Lain-lain	-	-	-																																																																		
Jumlah	520,602,000	744,050,000	(30.03)																																																																		
	Pendapatan atas Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nama Perusahaan</th><th>Keterangan</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>PT ALPHA CENTAURI BERJANGKA</td><td>Lapkeu bulanan bulan Desember 2024</td><td>600,000</td></tr><tr><td>2</td><td>PT OCTA INVESTAMA BERJANGKA</td><td>Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024</td><td>400,000</td></tr><tr><td>3</td><td>PT SAGAFX SUKSES BERJANGKA</td><td>Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024</td><td>200,000</td></tr><tr><td>4</td><td>PT Alpha Centauri Berjangka</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>2,400,000</td></tr><tr><td>5</td><td>PT Indoforex Nasional Futures</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>6</td><td>PT Trive Invest Futures</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>7</td><td>PT XTB Indonesia Berjangka</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>8</td><td>PT Laba Forexindo Berjangka</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>9</td><td>PT Soegree futures</td><td>Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025</td><td>400,000</td></tr><tr><td>10</td><td>PT Alpha Centauri Berjangka</td><td>Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Februari 2025</td><td>400,000</td></tr><tr><td>11</td><td>PT Indoforex Nasional Futures</td><td>Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Januari 2025</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>12</td><td>PT Fintech Maju Berjangka</td><td>Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>13</td><td>PT Midtou Aryacom Futures</td><td>Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>14</td><td>PT Langit Indonesia Berjangka (DK)</td><td>Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan April 2025</td><td>200,000</td></tr><tr><td>15</td><td>PT First State Futures</td><td>Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025</td><td>600,000</td></tr><tr><td>16</td><td>PT Victory International Futures</td><td>Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025</td><td>600,000</td></tr></table>	No	Nama Perusahaan	Keterangan	Jumlah	1	PT ALPHA CENTAURI BERJANGKA	Lapkeu bulanan bulan Desember 2024	600,000	2	PT OCTA INVESTAMA BERJANGKA	Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024	400,000	3	PT SAGAFX SUKSES BERJANGKA	Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024	200,000	4	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	2,400,000	5	PT Indoforex Nasional Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000	6	PT Trive Invest Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000	7	PT XTB Indonesia Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000	8	PT Laba Forexindo Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000	9	PT Soegree futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	400,000	10	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Februari 2025	400,000	11	PT Indoforex Nasional Futures	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Januari 2025	1,000,000	12	PT Fintech Maju Berjangka	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025	200,000	13	PT Midtou Aryacom Futures	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025	200,000	14	PT Langit Indonesia Berjangka (DK)	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan April 2025	200,000	15	PT First State Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025	600,000	16	PT Victory International Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025	600,000
No	Nama Perusahaan	Keterangan	Jumlah																																																																		
1	PT ALPHA CENTAURI BERJANGKA	Lapkeu bulanan bulan Desember 2024	600,000																																																																		
2	PT OCTA INVESTAMA BERJANGKA	Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024	400,000																																																																		
3	PT SAGAFX SUKSES BERJANGKA	Keterlambatan Laporan Dirkep Bulan Desember 2024	200,000																																																																		
4	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	2,400,000																																																																		
5	PT Indoforex Nasional Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000																																																																		
6	PT Trive Invest Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000																																																																		
7	PT XTB Indonesia Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000																																																																		
8	PT Laba Forexindo Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	200,000																																																																		
9	PT Soegree futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Januari 2025	400,000																																																																		
10	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Februari 2025	400,000																																																																		
11	PT Indoforex Nasional Futures	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Januari 2025	1,000,000																																																																		
12	PT Fintech Maju Berjangka	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025	200,000																																																																		
13	PT Midtou Aryacom Futures	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan Maret 2025	200,000																																																																		
14	PT Langit Indonesia Berjangka (DK)	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan April 2025	200,000																																																																		
15	PT First State Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025	600,000																																																																		
16	PT Victory International Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Maret 2025	600,000																																																																		

17	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Februari 2025	800,000
18	PT Soegee Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Februari 2025	400,000
19	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Maret 2025	1,200,000
20	PT IDFX Futures Internasional	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Maret 2025	200,000
21	PT International Mitra Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Maret 2025	200,000
22	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan April 2025	600,000
23	PT CGS International Futures Indonesia	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan April 2025	200,000
24	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Mei 2025	800,000
25	PT Porto Komoditi Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Mei 2025	200,000
26	PT Orbi Trade Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Mei 2025	200,000
27	PT MRG Mega Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Mei 2025	200,000
28	PT Shanum Maju Bersama	Uang masuk ke rekening <i>bukan</i> dari perusahaan pialang	2,000
29	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Juni 2025	200,000
30	PT International Business Futures	Keterlambatan Penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan bulan Juli 2025	200,000
31	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Juni 2025	600,000
32	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Juli 2025	3,400,000
33	PT International Mitra Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Juli 2025	200,000
34	PT Mega Menara Mas Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Juli 2025	200,000
35	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Agustus 2025	1,000,000
36	PT Traze Andalan Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Agustus 2025	200,000
37	PT Trive Invest Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Agustus 2025	200,000
38	PT International Mitra Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Agustus 2025	200,000
39	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Juni 2025	200,000
40	PT Central Capital Futures	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan September 2025	600,000
41	PT Porto Komoditi Berjangka	Keterlambatan laporan bulanan direktur kepatuhan bulan September 2025	3,800,000
42	PT Indoforex Nasional Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	4,200,000
43	PT International Business Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	9,600,000
44	PT PG Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	3,800,000
45	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	9,800,000

	46	PT Mandiri Investindo Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	200,000
	47	PT Central Capital Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	200,000
	48	PT Gatra Mega Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	600,000
	49	PT First State Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	2,400,000
	50	PT Midtou Aryacom Futures	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	2,800,000
	51	PT World Index Investment	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	1,000,000
	52	PT Sejahtera Membangun Negeri	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	4,000,000
	53	PT Usaha Forexindo Indonesia	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	32,000,000
	54	PT Midtou Aryacom Futures	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan I	200,000
	55	PT World Index Investment	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan I	400,000
	56	PT Central Capital Futures	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan III	200,000
	57	PT Central Capital Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Oktober 2025	200,000
	58	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan September 2025	400,000
	59	PT International Mitra Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan September 2025	200,000
	60	PT Ajaib Futures Asia	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Oktober 2025	200,000
	61	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Oktober 2025	600,000
	62	PT Arjuna Perkasa Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Oktober 2025	400,000
	63	PT CGS International Futures Indonesia	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Oktober 2025	200,000
	64	Langit Indonesia Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Oktober 2025	200,000
	65	PT First State Futures	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan IV 2024	200,000
	66	PT CGS International Futures Indonesia	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan IV 2024	4,400,000
	67	PT Laba Forexindo Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Desember 2024	200,000
	68	PT Sentratama Investor Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Desember 2024	200,000
	69	PT Adhikarya Cipta Persada	Keterlambatan laporan keuangan Tahunan 2024	5,200,000
	70	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan Triwulan IV 2024	6,000,000
	71	PT Alpha Centauri Berjangka	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Desember 2024	2,200,000
	72	PT Soegee Futures	Keterlambatan laporan keuangan harian bulan Desember 2024	1,400,000
	73	PT Indofores Nasional Futures	Keterlambatan laporan keuangan bulanan bulan Januari 2025	2,000,000
				119,602,000

	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan atas Perizinan dan Pendapatan atas Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK. Terdapat Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan sebesar Rp401.000.000,- dan Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan sebesar Rp119.600.000,-. Pendapatan atas Perizinan adalah sebagai berikut: 1) IWPB senilai Rp53.000.000; 2) Izin Usaha Pialang Berjangka senilai Rp20.000.000; 3) Izin Usaha Penasihat Berjangka senilai Rp30.000.000; 4) Izin Wakil Penasihat Berjangka senilai Rp5.000.000; 5) Persetujuan Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan senilai Rp5.000.000; 6) Persetujuan Bursa Berjangka dalam Rangka Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Subyek Komoditi senilai Rp5.000.000; 7) Persetujuan Pedagang Fisik Emas Digital senilai Rp15.000.000; 8) Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta SPA senilai Rp7.500.000; 9) Persetujuan Sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto senilai Rp75.000.000; 10) Persetujuan Sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) senilai Rp30.000.000; 11) Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) senilai Rp40.000.000; 12) Ujian Profesi Calon Wakil Penasihat Berjangka senilai Rp33.000.000; dan 13) Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka senilai Rp82.500.000.	
<i>Beban Pegawai</i> <i>Rp0</i>	D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.334.616.327,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun Beban Pegawai tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya perpindahan anggaran belanja pegawai ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.	

	Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 <table><tr><th>URAIAN JENIS BEBAN</th><th>TA 2025</th><th>TA 2024</th><th>NAIK (TURUN) %</th></tr><tr><td>Beban Gaji</td><td>-</td><td>735.628.374</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Beban Tunjangan-Tunjangan</td><td>-</td><td>552.499.953</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Beban Uang Makan</td><td>-</td><td>25.086.000</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Beban Lembur</td><td>-</td><td>21.402.000</td><td>(100,00)</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>-</td><td>1.334.616.327</td><td>(100,00)</td></tr></table>	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %	Beban Gaji	-	735.628.374	(100,00)	Beban Tunjangan-Tunjangan	-	552.499.953	(100,00)	Beban Uang Makan	-	25.086.000	(100,00)	Beban Lembur	-	21.402.000	(100,00)	Jumlah	-	1.334.616.327	(100,00)
URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %																						
Beban Gaji	-	735.628.374	(100,00)																						
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	552.499.953	(100,00)																						
Beban Uang Makan	-	25.086.000	(100,00)																						
Beban Lembur	-	21.402.000	(100,00)																						
Jumlah	-	1.334.616.327	(100,00)																						
Beban Persediaan Rp711.898.195	D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp711.898.195,- dan Rp105.906.820,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Adapun rincian Beban Persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut: Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 <table><tr><th>URAIAN JENIS BEBAN</th><th>TA 2025</th><th>TA 2024</th><th>NAIK (TURUN) %</th></tr><tr><td>Beban Persediaan Konsumsi</td><td>711.898.195</td><td>505.906.820</td><td>40,72</td></tr><tr><td>Beban Persediaan Bahan Baku</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Beban Persediaan Suku Cadang</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Beban Persediaan Lainnya</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah Beban Persediaan</td><td>711.898.195</td><td>505.906.820</td><td>40,72</td></tr></table>	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %	Beban Persediaan Konsumsi	711.898.195	505.906.820	40,72	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-	Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	Jumlah Beban Persediaan	711.898.195	505.906.820	40,72
URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %																						
Beban Persediaan Konsumsi	711.898.195	505.906.820	40,72																						
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-																						
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-																						
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-																						
Jumlah Beban Persediaan	711.898.195	505.906.820	40,72																						
Beban Barang Jasa Rp8.290.930.562	D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.291.830.562,- dan Rp11.364.449.716,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Adapun rincian Beban Jasa untuk tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:																								

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.113.848.774	3.034.117.208	(30,33)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.490.015	13.310.822	(43,73)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	223.112.000	244.842.000	(8,88)
Beban Barang Operasional Lainnya	33.642.835	36.262.297	(7,22)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
Beban Bahan	2.401.711.106	2.253.545.201	6,57
Beban Honor Output Kegiatan	137.909.000	306.305.000	(54,98)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	229.526.619	459.206.959	(50,02)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00
Beban Langganan Telepon	4.471.713	16.892.294	
Beban Jasa Konsultan	320.474.000	187.770.500	70,67
Beban Sewa	1.027.886.000	1.285.300.840	(20,03)
Beban Jasa Profesi	840.500.000	1.820.800.000	(53,84)
Beban Jasa Lainnya	951.258.500	1.580.154.795	(39,80)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya		125.941.800	
Jumlah	8.291.830.562	11.364.449.716	(27,04)

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.978.409.364*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.978.409.364,- dan Rp1.637.193.555,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun rincian Beban Pemeliharaan tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	716.301.624	850.569.855	(15,79)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.089.195.270	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	172.912.470	786.623.700	(78,02)
Jumlah	1.978.409.364	1.637.193.555	20,84

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp6.885.743.147*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.885.743.147,- dan Rp10.276.581.257,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-1.110.280	0	0,00
Beban Perjalanan Biasa	5.247.831.419	7.136.423.211	(26,46)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	639.900.000	932.308.000	(31,36)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	297.710.000	282.335.000	5,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	701.412.008	1.313.458.423	(46,60)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	612.056.623	(100,00)
Jumlah	6.885.743.147	10.276.581.257	(33,00)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp33.750.000,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Adapun rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	-	-	
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan	-	-	
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	33.750.000,00	(100,00)
Jumlah	-	33.750.000,00	(100,00)

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0.-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Adapun rincian Beban Bantuan Sosial tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp648.757.458*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp648.757.458,- dan Rp807.978.005,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	641.531.720	807.182.505	(20,52)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	7.225.738	795.500	-
Jumlah Penyusutan	648.757.458	807.978.005	(19,71)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	648.757.458	807.978.005	-19,71

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp149.57,-. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	0	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-623	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 180,395 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(180.395)	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan 0 Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	330.592	-
Jumlah	-	149.574	

*Beban Lain-lain
Rp.0.-*

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Adapun rincian atas Belanja Lain-Lain tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp598.482.110)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 (Rp598.482.110) dan Rp149.294.038,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(669.520.560)	-	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71.038.450	149.294.038	(52,42)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(598.482.110)	149.294.038	(500,87)

	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari: 1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.2.969.300; 2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.68.069.150.																					
Pos Luar Biasa Rp.0.-	D.13 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Adapun rincian Pos Luar Biasa tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut: <i>Rincian Pos Luar Biasa Tahun 31 Desember 2025 dan 2024</i> <table><tr><th>URAIAN</th><th>TA 2025</th><th>TA 2024</th><th>NAIK (TURUN) %</th></tr><tr><td>Pendapatan PNB</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Beban Perjalanan Dinas</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Beban Persediaan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %	Pendapatan PNB	-	-	-	Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	Beban Persediaan	-	-	-	Jumlah	-	-	-	
URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %																			
Pendapatan PNB	-	-	-																			
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-																			
Beban Persediaan	-	-	-																			
Jumlah	-	-	-																			

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal Rp.12.459.695.115</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.459.695.115,- dan Rp12.313.633.961,-.
<i>Defisit LO (Rp18.594.518.836)</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp18.594.518.836) dan (Rp25.067.281.216). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif yang Disebabkan oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp.0.-</i>	E.3 Dampak Kumulatif yang Disebabkan oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Jumlah Dampak Kumulatif yang disebabkan oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,-. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap.
<i>Penyesuaian Nilai Aset Rp.0.-</i>	E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-.
<i>Koreksi Nilai Persediaan Rp.0.-</i>	E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-.
<i>Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0</i>	E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Reklasifikasi Masuk/Reklasifikasi Keluar pada update Aplikasi Persediaan yang terbaru menghasilkan akun koreksi atas Reklasifikasi. Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp4.468.000)dan

	Rp0,-.												
<i>Selisih Revaluasi Aset Rp.0.-</i> <i>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 175,453,576.-</i> <i>Koreksi Lain-lain Rp.0.-</i>	E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset adalah selisih yang diakibatkan oleh penilaian kembali aset tetap. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. E.4.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset pada periode sebelumnya sehubungan dengan adanya pengembalian belanja modal dari tahun anggaran yang lalu. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp175.453.576 dan (Rp243.540). E.4.6 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-.												
<i>Transaksi Antar Entitas Rp17.704.365.034</i>	E.5 Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp17.704.365.034 dan Rp25.213.585.910. Adapun rincian tersebut terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ditagihkan ke Entitas Lain</td><td>Rp 18.353.908.269</td></tr> <tr> <td>Diterima dari Entitas Lain</td><td>Rp (624.890.450)</td></tr> <tr> <td>Transfer Keluar</td><td>Rp (139.427.000)</td></tr> <tr> <td>Transfer Masuk</td><td>Rp 114.774.215</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>Rp 17.704.365.034</td></tr> </tbody> </table>	Uraian	Jumlah (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 18.353.908.269	Diterima dari Entitas Lain	Rp (624.890.450)	Transfer Keluar	Rp (139.427.000)	Transfer Masuk	Rp 114.774.215	Jumlah	Rp 17.704.365.034
Uraian	Jumlah (Rp)												
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 18.353.908.269												
Diterima dari Entitas Lain	Rp (624.890.450)												
Transfer Keluar	Rp (139.427.000)												
Transfer Masuk	Rp 114.774.215												
Jumlah	Rp 17.704.365.034												
<i>Ekuitas Akhir Rp11.744.994.889</i>	E.6 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11,740,526,889,- dan Rp12.459.695.115,-.												

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat pengungkapan-pengungkapan lainnya baik pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang masih berbasis kas maupun pada Neraca dan Laporan Operasional (LO) yang berbasis akrual dan termuat dalam jurnal penyesuaian. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan yang rinciannya termuat dalam lampiran laporan keuangan ini.

F.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting pada tanggal periode pelaporan pada Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berhubungan dengan realisasi anggaran.

F.2.2 Jurnal Penyesuaian Neraca

Tidak terdapat Jurnal Penyesuaian terkait dengan transaksi akrual pada Neraca Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selama periode Pelaporan.

F.2.3 Jurnal Penyesuaian

Terdapat Jurnal Penyesuaian terkait dengan transaksi akrual pada Neraca, Neraca Percobaan, maupun Laporan Operasional (LO) Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Jurnal balik atas tagihan telepon Desember 2024 yang telah dibayarkan di bulan Januari 2025 dan belum dilakukan jurnal balik, maka di buat jurnal penyesuaian per 30 Juni 2025 sebesar Rp3.165.060,- yang berupa Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) terhadap Belanja Langganan Telepon (522112);
- 2) Jurnal pengakuan pendapatan PNB (piutang) pada Juni 2025: (i) PT Langit Indonesia Berjangka sebesar Rp200.000,- (ii) PT First State Futures sebesar Rp600.000,- dan (iii) PT Victory International Futures sebesar Rp.600.000,- untuk hal tersebut dilakukan penjurnalan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp1.400.000,-

- yakni Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211) pada Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan (425813).
- 3) Jurnal balik atas pengakuan piutang pendapatan denda (PNBP) yang lalu yakni pada bulan Juni 2025: (i) PT Langit Indonesia Berjangka (DK) sebesar Rp200.000,- (ii) PT First State Futures sebesar Rp600.000,- dan (iii) PT Victory International Futures sebesar Rp600.000,- untuk hal tersebut dilakukan penjurnalan pada tanggal 30 September 2025 sebesar Rp1.400.000,- yakni Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan (425813) pada Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211).
 - 4) Jurnal balik ke pendapatan lain-lain atas kesalahan transfer PT Shanum sebesar Rp.2000,- untuk hal tersebut dilakukan penjurnalan yakni Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan (425813) pada Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999).

F.2.4 Jurnal Umum

Tidak Terdapat kejadian-kejadian penting pada tanggal periode pelaporan pada Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang perlu dijelaskan pada Jurnal Umum.

F.2.5 Pengungkapan Lain-Lain

Pencatatan BMN Aset Tak Berwujud atas SK Penghapusan tahun 2025, telah dilakukan penghapusan pada Desember 2024, sehingga tidak terdapat mutasi penghapusan di Semester I Tahun 2025. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) SK Penghapusan Nomor 25 tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 atas penghapusan Lisensi Firewall Fortige sebesar Rp90.016.560;
- 2) Surat Persetujuan Penghapusan BMN karena sebab lain Nomor S-305/MK.6/KNL.0703/2024 tanggal 13 Desember 2024 atas Pengembangan Aplikasi Penunjang Statistik PBK sebesar Rp149.050.000,-, SRG Mobile Android sebesar Rp197.615.000,-, dan Digitalisasi Peraturan Bappebti sebesar Rp155.870.000,-.